

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bappeda Sleman, 2014, *Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sleman*, Sleman: Bappeda Sleman
- Bappeda Sleman, 2019, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020*, Sleman: Bappeda Sleman
- Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2006, *General Survey on Labour Inspection*, Jenewa: ILO
- Dupper, O., Fenwick, C., Hardy, T., 2016, *The Interaction of Labour Inspection and Private Compliance Initiatives: A Case Study Of Better Work Indonesia*, Jenewa: ILO.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gurbuzer, Yonca, 2012, *Child Labour and Education in Indonesia*, Jenewa: ILO
- Hammer, J.D.G., 2002, *Combating Child Labour: A Handbook For Labour Inspectors*, Jenewa: ILO.
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2015, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 2008, *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Jakarta: Sekretariat Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Sitra Aditya Bakti.
- Richthofen, Wolfgang Von, 2002, *Labour Inspection: A guide to the Profession*, Jenewa: ILO.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

UPT P2TP2A Sleman, 2018, *Laporan Pencatatan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman 2018*, Sleman: UPT P2TP2A Sleman.

Usman, Hardius dan Djalal, Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: Grasindo.

Winrock International, 2008, *Best Practices in Preventing and Eliminating Child Labor through Education Drawn from the Global CIRCLE Project*, Little Rock: Brockinton Company

Wiryani, Fifik, 2003, *Perlindungan Pekerja Anak*, Malang: UMM Press.

Artikel Jurnal

Weil, David, *A Strategic Approach to Labour Inspection*, International Labour Review, Vol. 147, No. 4, 2008.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dewi, Murti Pramuwardhani, 2012, *Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak pada Sektor Informal di Kabupaten Sleman*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lena, Magda, 2015, *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Fenomena Pekerja Anak di Kota Serang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

Makalah

Irwanto, 2011, *Kajian Terhadap Peraturan, Kebijakan, dan Program-Program Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia*, ILO-IPEC, Jakarta.

Internet

Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018”, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, pada tanggal 18 November 2018.

Badan Pusat Statistik & Organisasi Perburuahan Internasional, “Pekerja Anak di Indonesia 2009”, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2010/01/>

26/16e071626b6d67e4fd413019/pekerja-anak-di-indonesia-2009.html, pada tanggal 3 Oktober 2018.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, “Modul Penanganan Pekerja Anak”, diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf, pada tanggal 3 Oktober 2018.

Hasoloan, Maruli A., 2017, “Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Inovasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_549805.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

ILO, “About the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)”, <https://www.ilo.org/ipecc/programme/lang--en/index.htm>, diakses pada 23 Januari 2019.

ILO-IPEC, 1998, “ILO-IPEC Highlights of 1998”, <https://www.ilo.org/public/english/standards/ipecc/publ/policy/high-98/indexpr.htm#02>, diakses pada 23 Januari 2019.

Kementerian Dalam Negeri, 2017, “Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, <https://slideplayer.info/slide/11856930/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan ILO, 2011, “Factsheet on Labour Inspection in Indonesia”, diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@lab_admin/documents/genericdocument/wcms_166317.pdf, pada 26 Desember 2018.

Kemnaker dan ILO, 2016, “Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia”, diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549703.pdf, pada tanggal 7 Oktober 2018.

Labour Administration and Inspection Programme (LAB/ADMIN), 2010, “Labour Inspection: What It Is and What It Does”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@lab_admin/documents/instructionalmaterial/wcms_141403.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

Redaksi, 2015, *Pengawas Ketenagakerjaan Setelah UU Pemda Baru*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru>, pada tanggal 11 Desember 2018.

Redaksi, 2016, Pengalihan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Efektif 2017, diakses dari <http://harian.analisadaily.com/kota/news/pengalihan-pegawai-pengawas-ketenagakerjaan-efektif-2017/261388/2016/09/06>, pada tanggal 11 Desember 2018.

Serikat Pekerja Nasional, *Pengertian dan Dasar Hukum Pengawas Ketenagakerjaan*, diakses dari <https://spn.or.id/pengertian-dan-dasar-hukum-pengawas-ketenagakerjaan/>, pada tanggal 21 Oktober 2018.

Strawson, Tim, *Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN*, diakses dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Report-on-Financing-SDGs-in-ASEAN1.pdf>, pada tanggal 18 November 2018.

Unicef Indonesia, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, 2012, diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/A7__B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf, pada tanggal 3 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.235/ MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.115/ MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.09/ MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.02/ MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/ MEN/XI/2011 tentang Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 709).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 438).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 62).

Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 12).